



Jaringan Bermasalah, Ujian SKD Molor
Musli diantisipasi sajak samulo ko, jaan gara-gara jaringan lelet indak konsen ujian.....!

Sampah tak Terkelola Capai 62,8 Ton
Relawan sampah kan lai banyak mah ndak Sanak, atau giatkan gotong royong liak.....!

Jadikan Silek Kebanggaan Orang Minang
Anak-anak milenial ko paratu diaja silek ko mah, tamasuak pandai basiek lidah.....!

TAJUK RENCANA

Objek Wisata Dibuka, Tetap Waspada

SEIRING menurunnya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah membuka kembali objek wisata. Namun dengan aturan yang ketat dan wajib vaksin. Bukan hanya itu, turis asing juga bakal diperbolehkan masuk, terutama ke Pulau Bali, Oktober 2021 mendatang.

Pembukaan kembali objek wisata karena kasus Covid-19 sudah menunjukkan tren penurunan beberapa pekan ini. Pemerintah telah berhasil menurunkan angka penularan virus, menekan angka 'positivity rate' hingga di bawah 5 persen. Selain itu menurunkan okupansi pasien di fasilitas kesehatan yang sempat mengalami krisis saat lonjakan infeksi akibat varian Delta pada Juli lalu.

Dibukanya kembali tempat wisata disambut gembira oleh masyarakat. Selama ini suntuk tak bisa ke mana-mana karena adanya PPKM, kini bisa bepergian lagi. Menikmati liburan ke tempat-tempat wisata bersama teman dan keluarga.

Mereka yang bergerak di industri pariwisata juga bersemangat lagi. Usahanya bakal hidup lagi. Pedagang kuliner, tukang parkir, penjual cenderamata, angkutan umum di seputar destinasi wisata kembali bergairah. Setelah berbulan-bulan kehilangan penghasilan, masa-masa itu sulit bakal berakhir. Asap dapur bakal mengepul lagi. Tak terkecuali travel agen, karena turis khusus untuk Pulau Bali diizinkan masuk lagi.

Meski begitu, ini bukan berarti masa-masa kelam telah berakhir. Saat ini kasus Covid-19 memang sudah turun, tapi tidak ada jaminan tidak akan naik lagi. Karena itu, tetap wajib mematuhi protokol kesehatan. Masuk objek wisata kalau tak punya sertifikat vaksin tak bakal diizinkan. Untuk Jakarta dan sekitarnya, masuk objek wisata mesti menscan barcode aplikasi pedulilindungi. Tapi di Padang harus memperlihatkan sertifikat vaksin.

Mungkin untuk persyaratan sertifikat vaksin bisa dikontrol, namun untuk protokol kesehatan apakah bisa terpantau seluruhnya? Bisa jadi saat masuk pengunjung pakai masker, namun setelah berada di dalam area objek wisata melepas maskernya. Potensi berkerumun juga rawan kalau tidak ada pantauan dan pengawasan.

Karena itu, butuh kesadaran pengunjung dan pengawasan yang ketat. Kalau ada yang melanggar jangan segan-segan memberi sanksi. Tetap waspada jika ada lagi gelombang ketiga setelah gelombang kedua di bulan Juli 2021 lalu. Berkaca pada kejadian waktu itu, karena pemerintah membuka keran arus mudik Lebaran setelah pelarangan saat libur Lebaran.

Kebijakan untuk membuka pintu masuk bagi turis asing juga mesti ada aturan yang ketat dan pertimbangan yang matang. Sebab varian virus korona yang beragam datangnya dari luar yang masuk ke Indonesia. Waspada varian berikutnya, jangan sampai masuk lagi ke Tanah Air. (*)



Naskah Opini panjang tulisan sekitar 750 kata. Kirim ke: opinipadek@gmail.com. Sertakan data CV, copy KTP, foto, dan nomor telepon.

Naskah yang sudah limahari di redaksi dan tidak termuat otomatis dianggap kembali ke pengirim.

LAYANAN PADEK

Anda punya uneg-uneg untuk mengkritisi persoalan yang terjadi di Sumatera Barat? Kirimkan uneg-uneg Anda ke email: opinipadek@gmail.com dengan subjek: Layanan Padek atau SMS ke 081267734980 dan 0811666438. Bisa juga ke Twitter dan Instagram @padangekspres.

G30S/TWK, Operasi Penyingkiran Pegawai KPK oleh Negara

Kuswandi

Wartawan JawaPos.com



Masih ada waktu dua pekan ke depan bagi Jokowi untuk mengambil keputusan yang bijak dengan membela pegawai KPK yang berintegritas untuk dilantik menjadi ASN. Jokowi bisa membuktikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dengan mengabaikan bisikan-bisikan jahat dari orang-orang yang ingin mendorongnya ke jurang kehancuran. Penting bagi presiden untuk mendengarkan rakyat. Sebab, sejatinya kedaulatan ada di tangan rakyat.

SETIAP tahun, pada 30 September menjadi peringatan penting atas kekalahan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965. Dalam sebuah film propaganda yang dibuat rezim orde baru, digambarkan penculikan dan pembantaian terhadap sejumlah jenderal dan perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa kelam ini pun dikenal dengan G30S/PKI.

Apa hubungannya dengan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? peristiwa itu tentu tak ada hubungannya sama sekali. Namun, 30 September bisa memberikan alternatif peringatan penting lainnya atas apa yang terjadi di Indonesia. Tanggal itu dipilih oleh KPK untuk menjadi hari terakhir bagi 57 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk bekerja.

Sebelumnya, batas waktu tersebut adalah 1 November. Itulah kenapa, Giri Supraptiono, pegawai KPK yang menjadi korban pemecatan, mensinyalir tanggal tersebut sengaja dipilih untuk membentuk persepsi negatif. Hal ini dinilai sangat kejam, sebab pemecatan ini bersamaan dengan hari pemberontakan yang dilakukan PKI 56 tahun silam.

Padahal faktanya, selama belasan tahun mengabdikan di KPK, para pegawai yang tak lolos TWK konsisten dalam berjuang memberantas korupsi. Membersihkan negara dari praktik curas yang dilakukan para garong duit rakyat. Mereka mewakafkan hidupnya untuk merah putih karena resiko tugasnya tidak main-main. Ada yang diancam dibunuh, ada yang ditabrak hingga mengalami luka-luka, hingga ada yang seperti Novel Baswedan, buta satu matanya akibat disiram air keras. Kendati demikian, mereka ada yang seperti Novel Baswedan, buta satu matanya akibat disiram air keras. Kendati demikian, mereka ada yang seperti Novel Baswedan, buta satu matanya akibat disiram air keras.

Dibidang prestasi, ada pegawai yang merupakan lulusan terbaik pel-

atihan kepemimpinan nasional II angkatan XVII di LAN dan mengajar wawasan kebangsaan di Lemhanas, Sesko-AS, Kemhan, Sespim Polri, para pejabat eselon 1 dan para kepala daerah hingga menteri. Ada pula pegawai yang menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo pada 2015. Jadi, kurang nasionalis apa mereka?

Pertanyaannya, bagaimana jika dibandingkan dengan para pimpinan KPK? Ketua KPK Firlil Bahuri misalnya. Dia terbukti pernah beberapa kali melanggar etik? Seperti diketahui, Firlil pernah bertemu pihak berkecual pada saat menjadi Deputi Penindakan KPK dan bergaya hidup mewah dengan naik Helikopter saat pulang kampung?

Baru-baru ini, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti berhubungan dengan pihak perkara, namun hanya dijatuhi hukuman dengan pemotongan gaji yang nilainya tak seberapa. Apakah nasionalisme hanya diukur dari sekedar retorika dengan mengaku anak bangsa namun nirprestasi?

Tidak salah jika apa yang dipu-

tuskan Firlil Bahuri Cs dengan men-depak Novel Baswedan dan pegawai lainnya per 30 September adalah buru-buru. Sebab, Ombudsman maupun Komnas HAM menemukan berbagai pelanggaran, seperti maladministrasi, hingga adanya sebelas pelanggaran HAM dalam proses TWK.

Jika ditelaah, dalih pimpinan KPK yang menyebut pemecatan berdasarkan putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) tidak tepat. Sebab, putusan MK hanya menyangkut uji norma undang-undang KPK. Sementara putusan MA, hanya menyangkut uji formal dan material dari Perkom KPK. Putusan tersebut sama sekali tak melegalisasi tindakan maladministrasi yang ditemukan Ombudsman dan tidak menyentuh aspek pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM dalam proses penyelenggaraan TWK. Tafsir sesat itu membuat pimpinan KPK sembrono.

Menanggapi pemecatan itu, di hadapan sejumlah pimpinan media, Presiden Jokowi justru memberikan

kesan cuci tangan. Dia meminta agar semua urusan tidak dibebankan kepada dirinya, termasuk pemecatan pegawai KPK. Padahal, dalam berbagai kesempatan dia kerap ikut campur pekerjaan remeh temeh. Seperti bagi-bagi sembako yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Bagi-bagi sertifikat kepada warga. Segala sesuatu yang tidak harus dilakukan langsung oleh presiden.

Pernyataan Jokowi tidak cocok dengan ucapan sebelumnya yang meminta agar alih status pegawai KPK menjadi ASN tak merugikan pegawai. Sebagai presiden, Jokowi seharusnya tidak menjadikan putusan MK dan MA sebagai dasar. Sebab, dalam Pasal 38 Ayat 1 UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Jokowi sebagai pejabat pembina kepegawaian tertinggi (atasan terlapor), bersama-sama dengan terlapor (KPK) wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Oleh karena itu, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi wajib memberi contoh yang baik dengan mematuhi aturan Undang-undang. Jika tidak mematuhi, maka sejarah akan mencatat Jokowi sebagai kepala negara yang telah membuang anak bangsa pemberantasan korupsi. Jokowi juga akan dinilai sebagai satu-satunya presiden dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Masih ada waktu dua pekan ke depan bagi Jokowi untuk mengambil keputusan yang bijak dengan membela pegawai KPK yang berintegritas untuk dilantik menjadi ASN. Jokowi bisa membuktikan dukungannya terhadap pemberantasan korupsi dengan mengabaikan bisikan-bisikan jahat dari orang-orang yang ingin mendorongnya ke jurang kehancuran. Penting bagi presiden untuk mendengarkan rakyat. Sebab, sejatinya kedaulatan ada di tangan rakyat. (*)

Edukasi 1000 Hari Pertama Kehidupan dan Upaya dalam Mengatasi Permasalahan Gizi pada Balita

Dr Azrimaidaliza, SKM, MKM

Dosen Jurusan Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

PERMASALAHAN gizi pada balita antara lain gizi kurang, kurus dan *stunting* menunjukkan kecenderungan peningkatan angka kejadian, terutama *stunting* (pendek). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang terakhir yaitu pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi pendek dan sangat pendek pada balita sebesar 30,8% di Indonesia. Walaupun angka tersebut mengalami penurunan dari Riskesdas sebelumnya (tahun 2013), namun angka *stunting* tersebut masih tinggi dan dikategorikan sebagai permasalahan kesehatan masyarakat (diatas 20%). Angka tersebut juga tidak jauh berbeda dengan prevalensi *stunting* pada balita di Provinsi Sumatera Barat. Kecenderungan kejadian *stunting* saat ini adalah balita *stunting* tidak hanya banyak ditemui di daerah perdesaan namun sekarang di daerah perkotaan juga sudah mulai banyak ditemukan kasus *stunting*. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang melanda Indonesia yang berdampak kepada perekonomian masyarakat dan ketersediaan pangan keluarga.

Penyebab permasalahan gizi khususnya usia balita adalah multifaktor, tidak hanya penyumbang terjadinya masalah ini dari faktor gizi seperti asupan makanan yang bergizi tidak terpenuhi dengan baik namun faktor non gizi seperti lingkungan yang kurang bersih, pendidikan dan pengetahuan yang rendah seperti faktor ekonomi turut berperan terhadap permasalahan ini. Faktor asupan makanan yang bergizi tidak terpenuhi terutama terjadi pada pe-

riode 1000 hari Pertama Kehidupan atau disingkat 1000 HPK. Yang dimaksud masa 1000 HPK adalah masa 270 hari selama kehamilan atau 9 bulan kehamilan ibu dan 730 hari pada dua tahun pertama kehidupan anak. Masa 1000 HPK dikatakan sebagai periode emas kehidupan yaitu masa terjadinya pertumbuhan dan perkembangan anak yang cepat dimulai dari dalam kandungan ibunya sampai anak tersebut lahir dan berusia 2 (dua) tahun. Sehingga pada periode tersebut dibutuhkan makanan yang bergizi tidak hanya dari segi mutu makanan yang dikonsumsi baik tapi juga secara jumlah juga sesuai dengan kebutuhan anak. Dampak yang akan dialami anak adalah risiko *stunting* pada usia berikutnya, kecerdasan tidak optimal dan risiko mengalami penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus dan penyakit jantung pada usia dewasa.

Pendekatan perbaikan gizi pada 1000 HPK merupakan salah satu strategi dalam mengatasi permasalahan gizi pada balita. Oleh karena itu, dianjurkan kepada ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik, konsumsi makanan bergizi yang cukup, sejumlah 2 kali dari makanan yang biasa dikonsumsi sebelum hamil dan mengkonsumsi makanan yang bervariasi dan beragam. Bayi yang tumbuh dan berkembang dengan baik selama dalam

kandungan ibu dapat dilihat dari berat badan badan dan panjang badannya setelah dilahirkan memiliki status gizi yang baik, yaitu berat badan lahirnya lebih dari 3,0 kg dan panjang badan lahirnya lebih dari 48 cm.

Pola makan bagi bayi yang baru lahir adalah bayi diberi Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif atau tidak diberi makanan lain hanya ASI selama 6 bulan, selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan dengan Makanan Pendamping ASI atau MP-ASI dengan jenis makanan yang sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi dan bertambahnya usia bayi. Setelah anak berusia 1 tahun mulai diperkenalkan dengan makanan yang biasa dikonsumsi oleh orang dewasa. Di samping itu, pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Pemberian makanan yang baik pada anak dapat dinilai dari status gizi anak yang juga baik.

Hal ini dapat dilihat dari pertambahan berat badan dan tinggi badannya meningkat sesuai dengan usianya begitu juga perkembangan motorik kasar dan halus anak seperti kemampuan dalam berjalan dan berbicara. Informasi gizi ini yang sebaiknya terus disampaikan kepada masyarakat terutama ibu akan pentingnya periode 1000 HPK serta pola makan yang baik diterapkan pada periode tersebut selain menerapkan

pola asuh lainnya seperti kesehatan, psikososial dan kebersihan.

Penyampaian informasi mengenai 1000 HPK kepada ibu-ibu dapat dilakukan melalui kegiatan edukasi, salah satunya di Posyandu. Hal ini terlihat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang penulis dan tim pengabdian dari Jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas lakukan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021. Pada kegiatan tersebut, diperoleh informasi bahwa belum semua ibu memahami tentang 1000 HPK, apa dampak kekurangan gizi selama 1000 HPK dan pola makan yang baik dalam upaya memperbaiki gizi anak. Penyuluhan dalam kelompok kecil kepada ibu-ibu dilaksanakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan adalah salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan ibu selama pandemi Covid-19.

Selain itu diberikan leaflet yang memuat informasi tentang 1000 HPK agar ibu dapat membaca di rumah dan diharapkan dapat meningkatkan pola makan yang bergizi dan sehat. Kegiatan pengabdian yang penulis lakukan berjalan dengan cukup baik, walaupun belum banyak ibu yang datang sesuai dengan target karena masih dalam kondisi PPKM. Melalui kerja sama dengan tenaga kesehatan salah satunya di Puskesmas Lapai dan komunikasi yang baik dengan kader Posyandu diharapkan kegiatan edukasi tersebut dapat dilaksanakan pada kegiatan Posyandu berikutnya dengan sasaran kegiatan pengabdian yang lebih luas. (*)

Padang Ekspres

www.padek.co

Terbit Sejak 25 Januari 1999

Badan Penerbit: PT Padang Intermedia Pers
Jawa Pos Media Group

Komisaris Utama : Suhendro Boroma
Komisaris : Amril Noor, H. Suryanto
Direktur : M Nazir Fahmi
Pemimpin Redaksi : Revdi Iwan Syahputra
Corporate Lawyer JPG : Andi Syarifuddin, SH, MH

■ **DIVISI PRODUKSI**
Redaktur Pelaksana : Suryani, Rommi Delfiano,
Penjab Minggu/Redpel Bisnis : Eri Mardinal
Koordinator Liputan : Eka Rianto
Redaktur : Ganda Cipta, Zulkarnaini,
Willian
Liputan Padang : Indra Kurniawan, Adetio
Purtama, Randi Zulfaahli.
Fotografer : Sy Ridwan
Sekretaris Redaksi : Novitri Selvia

■ **PERWAKILAN**
Bukittinggi/Agam : Rifa Yanas, Putra Susanto
Payakumbuh/50 Kota : Fajar Rillah Vesky, Arifdel Ilham
Pesisir Selatan : Yoni Syarifzal
Pasaman/Pasbar : Rohimuddin, Lumban Tori
Kota Solok/ Kab Solok : Frikel Adilla Mender
Sawahlunto : Herry, Amin Perwira
Dharmasraya : Zulfa Anita
Solok Selatan : Ardiono
Pariaman/ Padangpariaman : Zikriani ZN, Aris Prima Gunawan
Padangpanjang : Yuwardi
Tanahdatar : Nanda Anggara
Mentawai : Arif Rahmad Daud
Sijunjung : Yulicef Anthony

■ **PRACETAK DAN IT**
Kepala Pracetak : Jufri Jao
Koordinator IT : Adrianto Syafril

■ **DIVISI USAHA**
Manager Keuangan : Yossi Ariesta
Manager Umum dan SDM : Nurhelwani
Manager Sirkulasi & EO : Sukri Umar
Manager Iklan/Online & Kreatif : Heri Sugarto
Manager Penagihan : Sarbindi
Ass. Manager Penagihan : Ivo Fitriana
Ass. Manager EO & Iklan Luar Ruang : Dicky Junaidi

■ **ONLINE**
PT Padang Multimedia Korporindo
Direktur : Tandri Eka Putra
Alamat : Jl. Adinegoro No 17 A, Lubukbuaya, Padang.

■ **KANTOR IKLAN JAKARTA**
Perwakilan Jakarta
Manager Iklan Jakarta : Bustanol Arifin
Zulfais (Redaksi)

Alamat: Gedung Graha Pena Lt 6 Ruang 601 Jl. Kebayoran Lama No 12 Jakarta Selatan
Telepon: (021) 53699560, Fax: (021) 5333048, E-mail: padangekspresjarkata@yahoo.co.id
Website: www.padek.co, Edisi Digital: epaper.padek.co

■ **ALAMAT**
Redaksi/Usaha: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya Padang, Sumatera Barat
E-mail: liputanpadek@yahoo.com

■ **LAYANAN IKLAN DAN PELANGGAN**
Tarif Iklan: Iklan Display Halaman Pertama: Rp20.250/mmk (BW), Rp27.500/mmk (SC), Rp40.500/mmk (FC), Display Halaman Depan: Rp24.300/mmk (BW), Rp32.400/mmk (SC), Rp40.500/mmk (FC); Display Halaman Belakang: Rp14.850/mmk (BW), Rp18.900/mmk (SC), Rp27.000/mmk (FC); Iklan Sosial: Rp6.000/mmk; Iklan Jitu: Rp30.000/muat. Harga iklan ditambah pajak 10 persen. Harga Langganan: Rp105.000/bulan (Padang dan sekitarnya), luar kota tambah ongkos kirim.

■ **PERCETAKAN**
PT Padang Graindo Mediatama
Direktur : M Nazir Fahmi
Alamat: Jl. Adinegoro No. 17 A Lubukbuaya, Padang, Sumatera Barat.
Telepon/Fax: (0751) 481222. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

■ **Redaksi menerima tulisan karya asli, terjemahan atau saduran (dengan sumber asli bagi karya terjemahan dan saduran). Panjang tulisan 3 hingga 5 halaman, diketik spasi rangkap, sertakan identitas diri. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan. Redaksi berhak menyunting selagi tidak mengubah maksud tulisan.**

■ **Wartawan Harian Pagi Padang Ekspres dibekali identitas (kartu pers), dan tidak menerima pemberian berbentuk uang atau apa pun yang berhubungan dengan profesinya**